

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah. 1982. *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- A. Masyhar. 2008. *Pergaulan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial*. Unnes Press, Semarang.
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.
- A. Josias Simon R. 2011. *Budaya Penjara; Pemahaman Dan Implementasi*. Karya Putra Dawarti, Jakarta.
- A. Widiada Gunakarya. 2015. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Armico, Bandung.
- Bagir Manan, 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Media Group, Jakarta.
- _____. 2008. *Bunga Rampai; Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Fajar Interpretama Offset, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Bernard L Tanya dkk. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publising, Yogyakarta.
- B. Purnomo. 1956. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Jakarta.
- C.I. Harsono Hs. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Frans Magnis Suseno. 1988. *Kuasa Dan Moral*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Indah, C.M.S. 2011. *Pemberantasan Mafia Peradilan Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Masalah Hukum. Jakarta.
- John Rawls. 1973. *A Theory of Justice*. Oxford University press, London. (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.).
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI MK, Jakarta.
- Muhammad Hatta. 2019. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Unimal Press, Aceh.
- MR Rasyid. 2000. *Makna Pemerintah : Tinjauan dari Segi Etik dan Kepemimpinan*. PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Otji Salman. 2008. *Teori Hukum Mengingat; Mengumpul Dan Membuka Kembali*. Refika Aditama, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta.
- Prayitno Imam Santosa. 2015. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*. PT. Alumni, Bandung.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Robin Theobald. 1990. *Corruption, Development and Underdevelopment*. The McMillan Press Ltd., London. (Diterjemahkan oleh : Syed Hussein Alatas. 1995. *Rasuah; Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur).
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Editor Awaludin Marwa. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryono Sutarto. 2004. *Hukum Acara Pidana Jilid II*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suliantoro B. W & Runggandini C.W. 2018. *Konsep Keadilan Sosial Dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Waren*. Respons, Jakarta.
- Syed Hussein Alatas. 1999. *The Sociology of Corruption*. Delta Orient Pte. Ltd ed. 2, Singapore.

Teguh Prasetyo. 2015. *Keadilan Bermartabat*. Nusa Media, Bandung.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Genta Publishing, Yogyakarta.

B. JURNAL

Adlhiyati & Ahmad. *Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls*. Jurnal hukum, 2019.

Alvi Syahrin & J.S. Mahmud Mulyadi, *Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Narapidana Korupsi Di Lembaga Sosial Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial*, Journal Hukum Sosial Vol 05, 2017. (<http://Garuda.Ristekbrin.Go.Id/Documents?Select=Title&Q=Asimilasi+Narapidana&Pub=>)

Arif Iqbal Ramadhan. *Kebijakan Hukum Pidana Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah Sultan Agung Nomor 2 Edisi, 2022.

Azyumardi Azra. *Korupsi Dalam Perspektif Good Governance*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 43.2. Nomor 1 Edisi, 2002.

Bonanza Parulian Sidauruk & Mitro Subroto, *Efektivitas Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Terhadap Program Reintegrasi Sosial Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Grobogan*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2, Mei 2022.

Fajrianto. *Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial e-ISSN: 2745-5920 Vol. 4 Nomor 2, Juni 2023.

Firman Halawa, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*, Jurnal Sosial dan Ekonomi (Sosek) Vol 1 Issue 1, 2020

G.A. Arum. *Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila*. Jurnal Filsafat dan Teologi; Lumen Veritas, 2019.

Herlyanty Bawole. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal LexEtSocietatis Volume IX Issue 3, Juli-September 2021.

- H. Imam Hidayat. *Suatu Telaah Mengenai Sistem Pemasyarakatan di Lapas Dilihat Dari Aspek Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 No.2, Februari 2014.
- Ibra Fulezni Amri & Ariawan Gunadi. *Analisis Yuridis Terkait Pembebasan Bersyarat X Narapidana (Kasus Suap Djoko Tjandra Dan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jaksa Pinangki)*. Jurnal Serina Sosial Humaniora Vol.1, No.1, Feb2023.
- I Gde Suranaya Pandit, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Bioetika Administrasi Publik*, Jurnal Administrasi Publik “Public Inspiration” Vol. 8 No. 2, 2023.
- I Wayan Kevin Mahatya Pratama, dkk. *Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp)*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1, Maret 2022.
- Khomaini, dkk, *Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*, Journal of Lex Generalis (JLS) Vol 2, No.2, 2021.
- M. Shoim. *Interaksi Antara Pelayanan Publik Dan Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan Di Kota Semarang*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2011.
- M. Syamsudin. *Faktor-Faktor Sosiolegal Yang Menentukan Dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan*. Jurnal Hukum, 2010.
- Muhammad dkk, *Implikasi Hukum Pembebasan Narapidana Koruptor Dalam Kondisi Penyebaran Covid 19 Perspektif Sosiologi Hukum*, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 7, No. 2, Desember 2021.
- Muhammad Akbar Kum, *Hukum Indonesia Makin Lemah Terhadap Koruptor*, Jurnal Unes Law Review Volume 5 Issue 3, Maret 2023
- Muhammad Taufiq Idris dkk. *Program Pembinaan Dan Pemenuhan Hak-Hak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Raja*. Jurnal Hukum Doctrinal: Volume Nomor 1, Maret 2022.
- N. Surbakti. *Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Jurnal Hukum, 2010.
- Rasdi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi*, Jurnal Pandecta Volume 7 Nomor 1, Januari 2012.
- Sri Wulandari. *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.9 No.2, April 2012.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 yakni Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor MA No 28P/HUM/2021.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. SEMINAR/DISKUSI/MAKALAH/DISERTASI

Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

LBH Perjuangan, Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah).

Sahuri Lasmadi, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Air Langga, Surabaya, 2003.

Syafiruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Ras Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran” Makalah disampaikan pada Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Coordinator Daerah Sumatra Utara, Medan, 27 April 2007.

Edward O.S Hiariej, “Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi”: Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012.

E. INTERNET

[https:// aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa), diakses pada tanggal 5 Januari 2024.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44457/t/Memiskinkan+Koruptor+Melalui+Pembahasan+RUU+Perampasan+Aset+Berikan+Efek+Jera>, diakses pada tanggal 12 February 2024.

[https:// kbbi.web.id](https://kbbi.web.id). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana, diakses pada tanggal 2 February 2024.

<http://kamushukumonline.com/narapidana>, diakses pada tanggal 25 February 2024.

<https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/296-hak-dan-kewajiban-tahanan-dan-narapidana-menurut-undang-undang-nomor-22-tahun-2022>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024.

[http:// hukum.kompasiana.com](http://hukum.kompasiana.com), Dwika, “Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum”, diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

<http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, diakses pada tanggal 3 February 2024.

<http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum..html>, Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses pada tanggal 5 February 2024.

<https://core.ac.uk/download/files/379/11723191.pdf>, Shafruddin, Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, diakses pada tanggal 19 Januari 2024.

<https://grafis.tempo.co/read/3085/pro-kontra-23-napi-koruptor-bebas-bersyarat>, diakses pada tanggal 3 February 2024.

<https://nasional.tempo.co/read/1631555/mantan-jaksa-pinangki-bebas-bersyarat-apa-ketentuannya>, diakses pada tanggal 21 February 2024.

<https://news.detik.com/berita/d-6277082/jejak-zumi-zola-tersandung-2-kasus-di-kpk-hingga-bebas-bersyarat/3>, diakses pada tanggal 18 February 2024.

<https://visual.republika.co.id/berita/rhsi5a314/divonis-12-tahun-penjara-atut-hosiyah-bebas-bersyarat-di-tahun-ke8>, diakses pada tanggal 20 February 2024.

<https://nasional.tempo.co/read/1631555/mantan-jaksa-pinangki-bebas-bersyarat-apa-ketentuannya>, diakses pada tanggal 24 February 2024.

<https://news.detik.com/berita/d-6275989/ini-alasan-pinangki-sirna-malasari-eks-jaksa-dapat-pembebasan-bersyarat>, diakses pada tanggal 22 February 2024.

<https://news.detik.com/berita/d-6304246/ternyata-ini-yang-bikin-pinangki-dkk-bisa-dapat-pembebasan-bersyarat>, diakses pada tanggal 23 February 2024.

<https://www.jurnaljambi.co/2022/09/28/setelah-bebas-bersyarat-kpk-periksa-mantan-gubernur-jambi-zumi-zola/>, diakses pada tanggal 20 February 2024.

<https://news.detik.com/kolom/d-6317081/mempertanyakan-pembebasanbersyarat-koruptor>, diakses pada tanggal 24 February 2024.

<https://nasional.tempo.co/read/1631067/eks-gubernur-banten-ratu-atut-bebas-bersyarat-hari-ini-kemenkumham-wajib-ikut-bimbingan>, diakses pada tanggal 25 February 2024.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/13522061/kilas-balik-kasuskorupsi-dan-suap-ratu-atut-chosiyah-hingga-bebas-dari?page=all>, diakses pada tanggal 24 February 2024.

<https://news.detik.com/berita/d6278071/ditjen-pas-jelaskan-alasan-23koruptor-bisa-bebas-bersyarat>, (Muliawati, A. Ditjen Pas Jelaskan Alasan 23 Koruptor Bisa Bebas Bersyarat, September, 2022), diakses pada tanggal 25 February 2024.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/08/11251151/kala-23-koruptor-dibebaskan-bersyarat-korupsi-tak-lagi-jadi-kejahatan-luar-biasa> (Ni'am, S. Kala 23 Koruptor Dibebaskan Bersyarat, Korupsi Tak Lagi Jadi Kejahatan Luar Biasa?, September, 2022), diakses pada tanggal 24 February 2024.

<https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/infographics/5-hal-baru-yang-diubah-pada-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan>, diakses pada tanggal 2 April 2024.

<https://timesindonesia.co.id/kopi-times/429031/urgensi-lahirnya-undangundang-nomor-22-tahun-2022>